

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,
KETERANDALAN, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

Siti Zahroh¹, Indra Cahya Kusuma², Maria Magdalena Melani³,

¹Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda

Email: sitizahroh.elshiraz@gmail.com

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda

Email: mariamagdalenamelani2@gmail.com

³Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda

Email: indra.cahya.k@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk memahami pengaruh standar akuntansi pemerintahan, kredibilitas pemerintah, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif kausal dan pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sebagai berikut: *Purposive sampling*. Berdasarkan penelitian ini, variabel implementasi SAP berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kualitas pelaporan keuangan, variabel keandalan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kualitas pelaporan keuangan, dan SPIP berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kualitas pelaporan keuangan, kemudian variabel keterandalan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kualitas laporan keuangan, dan SPIP berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini hanya dilakukan di 30 OPD Kota Bogor.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Keterandalan dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Bentuk tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan administrasi Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengurus mempunyai kewajiban menyajikan laporan keuangan kepada masyarakat untuk menjelaskan pengelolaan dana masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mewajibkan pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan terkait juga. Laporan keuangan yang berkualitas

mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang baik. Indikator kualitas pelaporan keuangan diatur dalam PP 2010 No. 71 yaitu: (1) kepentingan; Artinya informasi yang dikandungnya dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini serta memprediksi penggunaannya di masa depan dalam pengambilan keputusan. (2) reliabel, artinya informasi yang dikandungnya tidak penting; (3) Informasi dalam sini mengandung sifat komparatif. Laporan tahunan dibandingkan dengan laporan tahunan sebelumnya.

Laporan keuangan pemerintahan daerah yang berkualitas disusun sesuai dengan standar yang berlaku. Akuntansi harus diterapkan secara konsisten untuk memastikan pelaporan dan akuntabilitas keuangan yang lengkap dan tepat waktu. PP No 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pelaporan keuangan adalah informasi yang terkandung dalam pelaporan keuangan dan tidak mencakup informasi berikut: kesalahpahaman, kesalahan besar, dan semua masalah yang telah diklarifikasi. Jujur dan terbukti. Putra (2017) berpendapat bahwa informasi dalam laporan keuangan dapat bermakna, namun jika pengungkapan informasi tidak dapat diandalkan, pengguna tidak dapat mempercayai informasi yang diberikan dan dapat menyesatkan. Penelitian menunjukkan bahwa hal ini dapat menyebabkan informasi menyesatkan. Berbahaya bagi pengguna. Selain itu, pelaporan keuangan yang berkualitas memerlukan sistem pengendalian internal negara.

SPIP merupakan strategi pengelolaan, pemantauan dan pengukuran sumber daya organisasi. Pengendalian internal ini diperlukan karena diperlukan petunjuk khusus dalam kegiatan operasional dan pelayanan. Ini berguna dan dapat menetapkan beberapa batasan dan ketentuan pada kinerja setiap tindakan. Setelah penyusunan laporan keuangan daerah, Badan Pengawasan Keuangan (BPK) melakukan audit untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Diperiksa apakah kriterianya terpenuhi. Sesuai dengan standar. akuntansi pemerintahan. UU Ahli Akuntabilitas dan Manajemen Audit No. 15 Tahun 2004 memberikan jawaban permasalahan keuangan dalam empat

pendapat: pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WDP); Surat kuasa (TW) dan pernyataan ditolak atau tidak dikabulkannya permohonan tidak relevan; (TMP). Selain itu, laporan hasil pemeriksaan BPK akan disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat.

Tabel 1.1

Ringkasan Hasil Audit Daftar Opini LKPD Kota Bogor Tahun 2015-2019

Pemerintah lokal	Pernyataan 2015	Pernyataan 2016	Pernyataan 2017	Pernyataan 2018	Pernyataan 2019
Kota Bogor	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: IHPS 1 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2014-2015, DPRD Kota Bogor menerima laporan pelanggaran Laporan Perekonomian Daerah (WDP). Hal ini disebabkan oleh beberapa kekurangan yang diidentifikasi oleh departemen audit. Kerugian tersebut adalah: Tenggat waktu. Namun, pernyataan WTP tersebut terbit antara tahun 2016 hingga 2018. Laporan WTP tersebut tidak menjamin pemerintah daerah atau organisasi daerah bebas dari korupsi. Khusus dalam pelaporan keuangan daerah, penilaian ini hanya sebagai kriteria untuk menilai apakah pelaporan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Badan Pemeriksa Keuangan mengidentifikasi sejumlah persoalan serius di LKPD Kota Bogor . Masalah utamanya tetap pada representasi wajar aset nominal di kolom neraca. Selain itu, pencatatan yang tidak akurat, ketidaksesuaian penyusunan laporan keuangan dengan SAP yang berlaku, waktu pelaporan yang tidak akurat, kualitas sumber daya manusia yang buruk, dan sistem informasi yang kurang memadai juga terkait. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap kualitas hasil pelaporan keuangan .

Selain itu, terdapat beberapa permasalahan pada bidang ini berupa kelemahan sistem pengendalian internal, antara lain:

1. Laporan perpajakan yang dihasilkan Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDEH) tidak sepenuhnya dapat diandalkan.
2. Pemutakhiran data tanah dan bangunan kena pajak perdesaan dan perkotaan (PBB P2) belum memberikan data wajib pajak dan informasi penghasilan yang valid sepenuhnya.
3. Aset tetap tersebut tidak sepenuhnya mencukupi.

Selain itu, teridentifikasi permasalahan berikut mengenai pelanggaran hukum dalam penyusunan laporan keuangan.

1. Kewajiban dipenuhi oleh pihak ketiga dan tidak ada peraturan tambahan yang dibuat untuk perubahan nama.
2. 7- P- Volume dan Spesifikasi Proyek Rehabilitasi jalan dan trotoar di Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Wilayah (PUPR) selama ini dan masih belum memadai (yaitu Rs. 798.667.479,77).
3. Hilangnya kapasitas produksi dan ketidaksesuaian spesifikasi fisik pada tiga paket pekerjaan konstruksi dan konstruksi senilai Rp2.283.341.303,91. <https://megapolitan.antaranews.com>.

Hasil studi implementasi SAP dipublikasikan oleh Meinars et al. (2019) dan menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan kumulatif (SAP) berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Mokoginta dkk. (2017) dengan judul "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Publik" menemukan bahwa sistem manajemen pemerintahan mempunyai dampak yang signifikan terhadap BPKAD di Boran Utara-Mongondo.

Selain itu, Putri, HPA dkk. (2019) Dampak Kompetensi SDM, SPI dan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Paris menemukan bahwa variabel SAP mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Paris. Laporan keuangan. saya beri pemerintah Saya Pemerintah Daerah Kabupaten Pali, OPD.

METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian ini mengkaji 30 organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah kota Bogor. Pada saat yang sama, metode kausal dan kuantitatif digunakan dalam desain penelitian.

Variabel independen penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi negara, keandalannya, dan sistem pengendalian internal negara. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaporan dan kualitas keuangan. Penelitian ini diikuti oleh 4.444 OPD di Kota Bogor. Populasinya adalah seluruh pegawai OPD Kota Bogor 30 orang yang berjumlah 1,50 orang. Teknik pengambilan sampel digunakan dan jumlah orang yang terlibat dijadikan sampel sebanyak 1000 orang. tipe data. diperlukan Investigasi berlanjut. Ini adalah data kuantitatif. Informasi kuantitatif. Gigi.

Data yang dikumpulkan berbentuk angka atau poin dan dianalisis menggunakan metode statistik (Sugiyono, 2016:137). keluar Digunakan untuk tujuan penelitian. Data primer diperoleh dari tanggapan 30 responden terhadap kuesioner yang disebar, dan data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka.

Peneliti melakukan teknik pengujian data untuk mengkonfirmasi Data ini memenuhi persyaratan untuk diproses dengan metode statistik. Teknik pengujian data meliputi analisis. Statistik deskriptif. Dan asumsi klasik. Analisis ini digunakan untuk menentukan skala keputusan akhir. Pengujian hipotesis klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas II, dan uji Heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menggambarkan karakteristik respondeng maka dilakukan analisis deskriptif penelitiang berdasarkan pada pengelompokan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan dan lama bekerja.

Tabel 4. Rekapitulasi Karakteristik Responden

No	Kriteria Responden	Karakteristik	Jumlah/orang
----	--------------------	---------------	--------------

1	Jenis Kelamin	Perempuan	56
2	Usia	30-41	45
3	Pendidikan Terakhir	S1	64
5	Masa Kerja	> 10 Tahun	65

Sumber : Datar diolah, 20211

Berdasarkan tabel 4, responden dengan jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 56 orang dengan rentan usia 30-41 tahun 45 orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 64 orang, yg dan lama bekerjanya lebih 7 dari 10 tahun sebanyak 65 orang.

Uji Normalitas

Pengujian *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* yaitu sebesar 0,062. Nilai *asympt.sig. 2 tailed* > 0,05 sehingga model regresi berdistribusi normal dan data layak untuk didiuji dalam penelitian ini.

Koefisien Korelasi Berganda

Analisis koefisien korelasi berganda dilakukan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara penerapan SAP, keterandalan, dan SPIP secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 8. Koefisien Korelasiy Berganda

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.825 ^a	.681	.671	2.00804

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa *R Square/R²* sebesar 0,681 atau 68,1%. Ini menunjukkan bahwa varians variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh penerapan SAP, keterandalan dan SPIP sebesar 68,1%. Sisa 31,9% (100% -68,1%) dapat dijelaskan oleh variabel selain model penelitian. Semakin besar R-square, semakin baik variabel dependen terhadap variabel independen prediktif.

Pengujian Hipotesis

Pengaruh Penerapan SAP, Keterandalan dan SPIP Secara Simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian uji F dilihat pada tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	824.747	3	274.916	68.180	.000 ^a
	Residual	387.093	96	4.032		
	Total	1211.840	99			

Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa hasil dari uji F penelitian ini diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 68,180 dengan nilai F_{tabel} sebesar 3,09. Apabila nilai F_{hitung} dibandingkan dengan nilai F_{tabel} maka F_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan F_{tabel} ($68,180 > 3,09$) dengan nilai signifikansi F kurang dari 0,05 sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa uji F menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi dan keterandalan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Penerapan SAP, Keterandalan dan SPIP Secara Parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian uji t dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.937	2.544		.761	.949
	Penerapan SAP	.302	.087	.262	3.459	.001
	Keterandalan	.524	.064	.581	8.182	.000
	SPIP	.149	.069	.165	2.161	.033

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Pengujian hipotesis menggunakan uji t dapat dilakukan dengan memperhatikan tingkat signifikansi yaitu sebesar 5% atau 0,05 dengan keputusan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, begitupun sebaliknya jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Tingkat keyakinan yang digunakan yakni 95% dan derajat kebebasan ($df = n - k$) ($100 - 3 - 1 = 96$), maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,984.

Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa:

1. Hasil pengujian menggunakan uji t diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel penerapan SAP adalah sebesar 3,459, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,984. Apabila t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,459 > 1,984$) dengan tingkat signifikansi 0,011 yang artinya kurang dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh penerapan SAP ini menunjukkan bahwa apabila nilai kualitas laporan keuangan meningkat artinya penerapan SAP pun meningkat.
2. Hasil pengujian dengan uji t diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel keterandalan adalah sebesar 8,182, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,984. Apabila t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($8,182 > 1,989$) dengan tingkat signifikansi 0,00 yang artinya kurang dari 0,05 ($0,00 < 0,05$). Menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga disimpulkan bahwa keterandalan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pengaruh ketreandalan ini menunjukkan bahwa apabila nilai kualitas laporan keuangan meningkat maka keterandalan akan meningkat.
3. Hasil pengujian dengan uji t diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel SPIP adalah sebesar 2,161, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,984. Apabila t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,161 > 1,984$) dengan tingkat signifikansi 0,033 yang artinya kurang dari 0,05 ($0,033 < 0,05$). Ini menyatakan H_0 ditolak dan H_a diterima, dapat disimpulkan SPIP berpengaruh positif signifikan terhadap

kualitas laporan. keuaangan Pengaruh dari SPIP ini menunjukkan bahwa jika nilai kualitas laporan keuangan meningkat maka SPIP tersebut akan meningkat.

KESIMPULAN

1. Secara simultan penerapan SAP, keterandalan dan SPIP berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kota Bogor.
2. Secara parsial penerapan SAP, keterandalan dan SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kota Bogor.

REFERENSI

- Aditya, Oregon, W. Surjono (2017). *Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan*. *Jurnal Sikap*, 2 (1), 49-62.
- Afiya, NN (2010). **Penerapan akuntansi keuangan kota**. Jakarta: Kencana.
- Ketua Anwar, Devi Meliana Mukadarul, 2016, "Sistem Pengendalian Intern Terhadap Dampak Sumber Daya Manusia , Komitmen Manajerial, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Prinseu", **Hukum, Bisnis dan Pemerintahan Vol.Konferensi Internasional** , Universitas Indonesia Bandar Lampung (UBL) III-30. ISSN 2339-1650, <http://article.ubl.ac.id/index.php/iconlbg/article/view/463> Diakses di Researchgate pada tanggal 26 Februari 2018.
- Asmarani, BK dan Swarno, AE (2018). **Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi Internal Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen** (Tesis PhD, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Bastiaan, I. (2010). **Akuntansi Sektor Publik di Indonesia** . Jakarta: Erlangga.
- Bastiaan, I. (2017). **Akuntansi Sektor Publik** . Jakarta: Erlangga.
- Chodija, S. & Hidayat, N. (2018). **Dampak Penggunaan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah** (Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Ulet* , Bagian 8 (1), 34-48.
- Faisal AD (2019). **Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sumenep**. (Tesis PhD, Universitas Wirarajah). <http://repository.wiraraja.ac.id/id/eprint/344>

- Fidhhotuzara, NJ (2020). **Pengaruh sistem pengendalian internal, pemahaman standar akuntansi pemerintahan (GSP), kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah** (tesis PhD, Universitas Islam Nasional Maulana Malik Ibrahim). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/22718>
- Gozali, Imam. 2005. **Penerapan analisis multivariat dengan menggunakan program SPSS**. Semarang. Pers Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusfi. 2014. **Akuntansi keuangan daerah. Edisi 4**. Jakarta : Salemba Empat
- Harahap, SS (2008). **Analisis Kritis Laporan Keuangan** . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Halo. (tahun 2012). **Analisis laporan keuangan** . Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- Rangkuman Hasil Ujian Semester I Tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- Jensen dan Meckling, 1976, **Teori Perusahaan: Perilaku Manajerial, Biaya Agensi dan Struktur Kepemilikan** , Jurnal Ekonomi Keuangan.
- Karsana IW dan Suaryana IGNA (2017). **Dampak Implementasi SAP, Fungsi SDM dan SPI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli**. *Jurnal Elektronik Akuntansi* , Vol. 21 (1), 643-670. ISSN2302-8556. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/33664>
- IPU Mahaputra dan IW Putra (2014). **Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah** . Jurnal Elektronik Akuntansi Universitas Udayana, Volume 8.2 (2014), 230-244. ISSN2302-8556.
- Mahmudi, 2016, **Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi** , Yogyakarta, Penerbitan UII.
- Mardiasmo 2004, **Akuntansi Sektor Publik** , Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mentu, EP (2016). **Penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Provinsi di Bidang Jasa Keuangan Daerah dan Pelayanan Sosial Provinsi. Peradangan**. Jurnal EMBA., Vol.4 No., hal. 1392-1399. ISSN2302-1174 . <https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.12359>
- Mokoginta, N., Lambie, L. dan Ponteau, W. (2017). **Dampak Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah** . *Survival: Jurnal Penelitian Akuntansi* , 12 (2). <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18282.2017>
- Ningrum Co., Ltd. (2018) **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kebumen**

- . (Artikel Universitas Islam Indonesia) <https://dspace.uui.ac.id> Diakses 7 April 2021 melalui Googlesholar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 (2008), **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**. Bayangan Auria.
- Rahmawati, D. (2018). **Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penggunaan TI dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kota Tangsel**. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi, 2018, Volume 2, Edisi 2, ISSN 2715-6052. <https://doi.org/10.32424/jeba.v20i2.1097>
- Renyowijoyo, Muindoro, 2013, **Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Nirlaba**, Edisi 3, Jakarta, Mitra Wacan Media.
- Liandani, R. (2017). **Pengaruh sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan**. Kertas. Universitas Negeri Padang. Bagian 5 Bagian 2. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2604/2100>
- Setyowati, L., Isthika, W. dan Pratiwi, R.D. (2016). **Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah Semarang**. Volume 20, Edisi 2 (2016), <https://doi.org/10.24002/kinerja.v20i2.843>
- Soemarso, 2014, **Pengantar Akuntansi**, Jakarta, Salemba 4.
- Sugiyono, 2017, **Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Penelitian dan Pengembangan**, Bandung, Alpha Beta.
- Widari, L. & Strisno, S. (2017). **Dampak sistem pengendalian intern pemerintah dan inisiatif organisasi terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah**. *Jurnal Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Manajemen)*, 5 (10), 117-126.